

**PERAN POLISI MILITER TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

**Debby Nauli Rafeyfa Simanjuntak, Irwan Triadi**  
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

E-mail: [naulirfy@gmail.com](mailto:naulirfy@gmail.com), [irwantriadi1@yahoo.com](mailto:irwantriadi1@yahoo.com)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis Polisi Militer dalam menangani tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sebagai aparat penegak hukum internal, Polisi Militer memiliki tanggung jawab untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penahanan, dan pelimpahan perkara ke Oditur Militer. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif, di mana sumber data diperoleh dari dokumen hukum, literatur ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan publikasi akademik terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa keterlibatan Polisi Militer tidak hanya berfokus pada aspek prosedural, tetapi juga mencerminkan komitmen institusional terhadap prinsip keadilan, disiplin, serta supremasi hukum. Polisi Militer memiliki kewenangan yang signifikan dalam menjaga integritas sistem hukum militer, mulai dari mengamankan tersangka, mengumpulkan bukti, hingga memastikan proses peradilan berjalan objektif dan transparan. Selain itu, Polisi Militer juga berperan dalam upaya preventif melalui edukasi hukum, pembinaan disiplin, dan peningkatan kesadaran prajurit terhadap aturan. Keseluruhan proses penegakan hukum terhadap pelaku pembunuhan dari unsur TNI membutuhkan profesionalisme, integritas, dan konsistensi hukum agar tercipta kepercayaan publik serta ketertiban di lingkungan militer. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem pembinaan hukum internal dan pengawasan berkelanjutan guna mencegah pelanggaran berat oleh personel TNI di masa mendatang.

**Kata Kunci :** Polisi Militer, TNI, Pembunuhan, Penegakan Hukum, Peradilan Militer

**Abstract**

*This study aims to analyze the strategic role of the Military Police in handling criminal acts of murder committed by members of the Indonesian National Army (TNI). As an internal law enforcement apparatus, the Military Police have the responsibility to conduct investigations, inquiries, detentions, and transfer cases to the Military Auditor. This study uses a literature study method with a qualitative descriptive approach, where data sources are obtained from legal documents, scientific literature, laws and regulations, and related academic publications. The results of the study indicate that the involvement of the Military Police is not only focused on procedural aspects, but also reflects an institutional commitment to*

**Article history**

Received: Juni 2025  
Reviewed: Juni 2025  
Published: Juni 2025

Plagiarism checker no 389

Doi : prefix doi :  
10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

*the principles of justice, discipline, and the supremacy of law. The Military Police have significant authority in maintaining the integrity of the military legal system, from securing suspects, collecting evidence, to ensuring that the judicial process is objective and transparent. In addition, the Military Police also play a role in preventive efforts through legal education, disciplinary development, and increasing soldier awareness of the rules. The entire process of law enforcement against perpetrators of murder from elements of the TNI requires professionalism, integrity, and legal consistency in order to create public trust and order in the military environment. This study recommends strengthening the internal legal development system and ongoing supervision to prevent serious violations by TNI personnel in the future.*

**Keywords:** *Military Police, TNI, Murder, Law Enforcement, Military Justice.*

## PENDAHULUAN

Penegakan hukum di lingkungan militer memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dari sistem peradilan umum. Keberadaan institusi Polisi Militer menjadi pilar penting dalam memastikan bahwa anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) mematuhi norma hukum, disiplin, dan etika yang telah ditetapkan oleh negara. Ketika seorang prajurit terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum, apalagi menyangkut tindak pidana berat seperti pembunuhan, peran Polisi Militer menjadi sangat vital untuk menjaga marwah institusi serta memastikan keadilan berjalan sebagaimana mestinya. Pembunuhan adalah tindak pidana yang sangat serius dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, serta hukum nasional maupun militer.<sup>1</sup> Ketika tindakan tersebut dilakukan oleh anggota TNI, dampaknya tidak hanya merusak kepercayaan publik terhadap individu pelaku, tetapi juga berpotensi mencoreng nama baik lembaga yang mengemban tugas mulia menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Dalam situasi seperti itu, Polisi Militer bertanggung jawab untuk mengambil langkah-langkah investigatif dan penegakan hukum secara tegas namun tetap mengedepankan asas profesionalisme dan keadilan.

Tugas Polisi Militer bukan hanya sebatas menangkap pelaku, melainkan mencakup seluruh rangkaian proses hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan perkara ke oditur militer. Proses ini memerlukan keahlian dan ketelitian, mengingat setiap tindakan yang diambil akan menjadi preseden yang menentukan citra lembaga militer di mata masyarakat dan lembaga penegak hukum lainnya. Polisi Militer harus mampu menunjukkan bahwa institusi militer tidak memberi ruang bagi impunitas atau perlakuan istimewa terhadap pelaku pelanggaran hukum, termasuk jika pelanggaran itu dilakukan oleh anggotanya sendiri. Dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, tertulis bahwa negara memiliki kewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia. Maka dari itu hukum harus berlaku adil dan tidak diskriminatif agar dapat terciptanya keadilan dan ketertiban hukum. Dalam penanganan tindakan pelanggaran hukum, termasuk oleh anggota TNI, harus diproses secara hukum oleh aparat yang berwenang seperti Polisi Militer. Kewenangan Polisi Militer diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta Peraturan Panglima TNI dan aturan internal lainnya.<sup>2</sup> Dalam praktiknya,

<sup>1</sup> Fitriana, M. K. (2014). Yurisdiksi Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Umum Yang Melibatkan Militer dan Sipil. *Arena Hukum*, Vol.7(80), 270-286.

<sup>2</sup> Nauli, D., Simanjuntak, R., Kadafi, A., Siahaan, B. J., Kaban, H. E., Aryaputra, F., Sukma, N. F., & Galuh, P. (2024). Kontribusi Dan Peran Polisi Militer Dalam Menegakkan Hukum Dan Keadilan Dalam Lingkungan Tentara Nasional Indonesia. *Jurnal*

Polisi Militer berfungsi sebagai penyidik awal terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota militer, termasuk dalam hal terjadinya tindak pidana umum seperti pembunuhan. Artinya, Polisi Militer memiliki kewajiban untuk menjunjung prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia bahkan terhadap tersangka yang berasal dari internal institusinya sendiri. Ketika terjadi kasus pembunuhan yang melibatkan prajurit TNI, langkah pertama yang dilakukan oleh Polisi Militer adalah melakukan penangkapan berdasarkan bukti awal dan laporan yang masuk. Setelah itu, dilakukan proses pemeriksaan awal yang bertujuan untuk menggali fakta dan menetapkan status hukum pelaku. Proses ini dilakukan dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, serta mempertimbangkan aspek teknis dan yuridis yang mendasari tindakan pelaku. Dalam beberapa kasus, keterlibatan Polisi Militer juga mencakup pengamanan tempat kejadian perkara, pengumpulan barang bukti, dan koordinasi dengan pihak oditurat dan penyidik militer lainnya.<sup>3</sup>

Integritas dan transparansi menjadi nilai krusial yang harus dijaga oleh Polisi Militer saat menangani kasus pembunuhan yang melibatkan anggotanya. Kegagalan dalam menunjukkan proses yang objektif dan akuntabel dapat memicu kecurigaan publik dan menurunkan legitimasi militer sebagai institusi negara. Kepercayaan masyarakat terhadap TNI juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana lembaga ini menyikapi dan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hukum di internalnya. Oleh sebab itu, profesionalisme aparat Polisi Militer menjadi pertaruhan besar bagi citra keseluruhan institusi militer di Indonesia.<sup>4</sup> Penanganan tindak pidana pembunuhan oleh anggota TNI tidak hanya berdampak hukum, tetapi juga berdimensi sosial dan psikologis. Keluarga korban dan masyarakat sekitar menaruh harapan besar pada proses hukum yang adil dan transparan. Di sisi lain, anggota militer yang terlibat juga memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan hukum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Polisi Militer harus mampu menyeimbangkan antara tuntutan keadilan publik dan pemenuhan hak asasi tersangka, tanpa membiarkan adanya tekanan yang dapat mencederai objektivitas penyidikan.

Dalam situasi yang melibatkan kepentingan publik luas, seperti pembunuhan yang dilakukan oleh personel berseragam, media massa dan masyarakat sipil biasanya turut mengawasi dan mengikuti perkembangan kasus. Hal ini menambah beban moral bagi Polisi Militer untuk bertindak profesional dan tidak memihak. Aparat yang terlibat diharapkan mampu mengedepankan asas legalitas dan proporsionalitas dalam setiap langkahnya. Mereka juga perlu menunjukkan kepada publik bahwa institusi militer tidak bersifat tertutup atau anti-kritik, melainkan siap menerima evaluasi demi perbaikan tata kelola hukum di internalnya. Di lingkungan militer, nilai-nilai disiplin dan hierarki sangat dijunjung tinggi. Namun, nilai tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk menutup-nutupi pelanggaran yang terjadi. Tindakan pembunuhan tetap merupakan kejahatan yang harus ditangani berdasarkan norma hukum nasional dan prinsip universal tentang hak untuk hidup. Polisi Militer harus menjadi garda terdepan yang memastikan bahwa nilai kedisiplinan itu tidak bertentangan dengan keadilan hukum. Mereka berperan sebagai penyeimbang antara kepentingan institusional dan kepentingan hukum yang berlaku umum.

Kasus pembunuhan oleh prajurit juga dapat menjadi indikator adanya persoalan psikologis, tekanan tugas, atau bahkan kelemahan dalam sistem pembinaan personel. Maka, penyidikan yang dilakukan oleh Polisi Militer sebaiknya juga memperhatikan aspek kejiwaan pelaku serta latar belakang sosial dan operasionalnya. Ini bertujuan agar penyidikan tidak hanya fokus pada pemidanaan semata, tetapi juga menjadi bahan evaluasi institusional untuk

---

*Relasi Publik*, 2(3), 304-309.

<sup>3</sup> Saiful, H. N. K. A. A. (2024). Kewenangan Memeriksa dan Mengadili Pengadilan Militer dalam Penyelesaian Tindak Pidana Umum yang Dilakukan oleh Anggota Militer Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia VII / MPR / 2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia Dan Peran Kepolisian Negara. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 3(4).

<sup>4</sup> Niken, S. U. B. S. (2014). Yurisdiksi Peradilan Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia Sebagai Pelaku Tindak Pidana. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(2), 100-105.

mencegah kejadian serupa di masa depan. Polisi Militer juga memiliki fungsi edukatif yang dapat diarahkan untuk membangun kesadaran hukum di kalangan prajurit.<sup>5</sup> Melalui penanganan kasus yang transparan dan konsisten, institusi ini dapat memberikan pesan kuat bahwa tidak ada toleransi terhadap tindakan pelanggaran hukum berat, termasuk pembunuhan. Ketegasan ini bisa menjadi instrumen preventif yang efektif dalam menurunkan potensi pelanggaran hukum oleh personel TNI di masa mendatang. Selain aspek penindakan, Polisi Militer juga memiliki peran strategis dalam merekomendasikan langkah-langkah perbaikan sistemik. Misalnya, jika ditemukan adanya kelalaian dalam pengawasan satuan atau lemahnya sistem pengendalian personel, maka Polisi Militer dapat menyampaikan evaluasi kepada pimpinan militer agar dilakukan perbaikan kebijakan. Tujuannya bukan hanya menjatuhkan hukuman, tetapi juga mendorong reformasi internal agar institusi militer lebih adaptif terhadap prinsip supremasi hukum.<sup>6</sup>

Di negara demokratis yang menjunjung tinggi prinsip negara hukum, semua warga negara, termasuk anggota militer, berada di bawah supremasi hukum. Polisi Militer menjadi perpanjangan tangan sistem hukum di lingkungan militer yang menjamin bahwa pelaku kejahatan tetap bisa dijatuhi hukuman, tanpa memandang status atau jabatan. Pelaksanaan fungsi ini membutuhkan keberanian moral, integritas, dan komitmen terhadap nilai-nilai keadilan yang sejati. Dalam banyak kasus, kerja sama lintas institusi antara Polisi Militer, Oditur, serta Komisi Kode Etik menjadi kunci keberhasilan penanganan perkara.<sup>7</sup> Pendekatan yang kolaboratif dapat mendorong penyelesaian perkara secara tuntas, serta menghindari tumpang tindih kewenangan atau hambatan birokrasi. Kolaborasi ini juga memastikan bahwa setiap tahapan proses hukum berjalan secara sinkron dan menghasilkan putusan yang adil bagi semua pihak.

#### TINJAUAN PUSTAKA

Penegakan hukum di lingkungan militer memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dari sistem peradilan umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, anggota TNI yang terlibat dalam tindak pidana harus melalui proses hukum militer sejak tahap penyidikan hingga putusan akhir. Dalam hal ini, Polisi Militer menjadi ujung tombak dalam menegakkan hukum di lingkungan TNI. Menurut (Nauli et al., 2024), fungsi Polisi Militer tidak hanya terbatas pada aspek teknis, seperti penyidikan dan pengamanan, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral untuk menjaga citra serta integritas institusi. Ketika pelanggaran berat seperti pembunuhan dilakukan oleh seorang prajurit, keberadaan Polisi Militer menjadi sangat penting untuk memastikan jalannya proses hukum yang adil, terukur, dan berdasarkan fakta. Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu bentuk pelanggaran serius yang tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga mencoreng kehormatan institusi militer. (Br.Purba et al., 2023) menyatakan bahwa tindakan semacam ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar seorang prajurit, seperti loyalitas, kehormatan, dan tanggung jawab. Tugas Polisi Militer dalam menangani perkara ini menjadi krusial karena menyangkut kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di tubuh TNI. Langkah awal seperti penangkapan, pemeriksaan, dan pengumpulan barang bukti harus dijalankan secara profesional agar tidak memunculkan persepsi negatif atau tuduhan perlakuan istimewa terhadap pelaku. Proses ini menuntut ketegasan namun tetap memperhatikan asas-asas hukum acara yang berlaku, termasuk penghormatan terhadap hak-hak tersangka sebagai warga negara.

<sup>5</sup> Parningotan, J. (2021). Peradilan Pidana Militer Dikaitkan dengan Asas Equality Before The Law. *Panji Keadilan Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*, 4(2), 246.

<sup>6</sup> Soekanto, S. (1977). Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 7(6), 462-468.

<sup>7</sup> Nauli, D., Simanjuntak, R., Kadafi, A., Siahaan, B. J., Kaban, H. E., Aryaputra, F., Sukma, N. F., & Galuh, P. (2024). Kontribusi Dan Peran Polisi Militer Dalam Menegakkan Hukum Dan Keadilan Dalam Lingkungan Tentara Nasional Indonesia. *Jurnal Relasi Publik*, 2(3), 304-309.

Isu yurisdiksi sering kali muncul dalam perkara pidana umum yang dilakukan oleh anggota militer. (Putra & Lubis, 2020) menjelaskan bahwa selama pelaku masih berstatus sebagai anggota aktif TNI, maka perkara yang melibatkan pidana umum seperti pembunuhan tetap ditangani oleh peradilan militer. Hal ini menegaskan bahwa hukum militer bersifat *lex specialis* terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit. Ketentuan ini menunjukkan pentingnya peran Polisi Militer dalam menjembatani proses hukum dengan otoritas internal militer tanpa mengabaikan prinsip keadilan. Ketika Polisi Militer menjalankan tugasnya secara akuntabel, kepercayaan terhadap sistem peradilan militer akan tumbuh, dan hal ini berdampak pada meningkatnya disiplin serta kepatuhan hukum di kalangan prajurit. Efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh aparat yang menjalankannya. (Soekanto, 1977) berpendapat bahwa keberhasilan sistem hukum tidak hanya terletak pada regulasi, melainkan juga pada sikap dan tindakan para penegak hukum. Polisi Militer sebagai bagian dari struktur hukum militer memegang peranan sentral dalam mengatur dan mengawasi perilaku prajurit. Fungsi preventif dijalankan melalui patroli hukum, penyuluhan, dan penegasan aturan disiplin. Ketika terjadi pelanggaran berat, fungsi represif mulai berlaku dengan pelaksanaan tugas penyidikan dan penahanan. Setelah itu, fungsi kuratif dijalankan melalui pengawasan pelaksanaan hukuman serta evaluasi terhadap akar penyebab pelanggaran, sebagai dasar bagi perbaikan sistem pengawasan dan pembinaan personel ke depan.

Kualitas penegakan hukum di lingkungan militer akan tercermin dari bagaimana Polisi Militer menjalankan perannya dalam menangani kasus pidana yang sensitif, seperti pembunuhan. (Yudi Krismen, 2014) menyebutkan bahwa penguatan institusi penegak hukum internal, termasuk Polisi Militer, merupakan indikator penting dalam membangun akuntabilitas militer secara menyeluruh. Ketika tindakan prajurit mencederai nilai-nilai kemanusiaan, seperti menghilangkan nyawa orang lain, maka respons lembaga penegak hukum militer harus menunjukkan komitmen terhadap prinsip keadilan dan supremasi hukum. Langkah-langkah yang diambil Polisi Militer tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk menunjukkan kepada publik bahwa institusi militer tidak membiarkan anggotanya bertindak di luar hukum. Ketegasan inilah yang memperkuat posisi TNI sebagai lembaga yang profesional dan bertanggung jawab di hadapan hukum nasional. (Putra & Lubis, 2020)

## **RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana peran Polisi Militer dalam proses penegakan hukum terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana pembunuhan?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Polisi Militer dalam menangani kasus pembunuhan yang melibatkan anggota TNI?
3. Bagaimana upaya penyelesaian Polisi Militer dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pembunuhan yang melibatkan anggota TNI?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Metode ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada pemahaman mendalam terhadap konsep, peran, dan prosedur hukum yang berlaku terkait keterlibatan Polisi Militer dalam menangani tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anggota TNI. Studi pustaka memungkinkan peneliti untuk mengkaji berbagai sumber ilmiah dan dokumen hukum guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai persoalan yang diteliti. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari literatur primer dan sekunder. Literatur primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan teknis dan administratif internal TNI yang mengatur kewenangan dan fungsi Polisi Militer. (Nauli et al., 2024) mengatakan sementara itu, literatur

sekunder mencakup buku-buku hukum, artikel jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, dan publikasi akademik lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

Prosedur penelitian dilakukan melalui tahapan identifikasi masalah, penelusuran literatur, seleksi sumber yang relevan dan kredibel, analisis isi, serta penyusunan simpulan dari hasil kajian teoritis dan normatif. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menitikberatkan pada penafsiran terhadap teks hukum, pendapat para ahli hukum, serta data sekunder yang mendukung argumentasi hukum dan institusional. (Widodo et al., 2023) menjelaskan bahwa pendekatan ini memfasilitasi peneliti untuk melihat bagaimana sistem hukum militer bekerja dalam menangani tindak pidana berat seperti pembunuhan, khususnya dari sudut pandang lembaga Polisi Militer sebagai aparat penegak hukum internal. Fokus utama dari penelitian ini adalah mengeksplorasi peran, mekanisme kerja, tantangan, serta implikasi hukum dari keterlibatan Polisi Militer dalam proses penanganan tindak pidana pembunuhan oleh anggota TNI. Dengan tidak melibatkan wawancara ataupun observasi langsung, penelitian ini mengandalkan ketelitian dan ketepatan dalam membaca serta mengkaji dokumen hukum dan sumber ilmiah agar dapat menghasilkan uraian yang logis, sistematis, dan mendalam. Melalui studi pustaka ini, peneliti berharap dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman akademik mengenai pentingnya peran Polisi Militer dalam menjaga supremasi hukum di lingkungan militer, serta memperkuat upaya penegakan hukum yang adil dan profesional di institusi pertahanan negara.

## PEMBAHASAN

Polisi Militer berperan besar dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran berat yang tidak hanya mencederai hukum pidana, tetapi juga merusak citra dan kehormatan institusi militer. Ketika seorang prajurit terlibat dalam kejahatan serius seperti ini, sistem peradilan militer memiliki tanggung jawab untuk bertindak cepat dan tepat dalam menangani kasusnya. Salah satu aktor kunci dalam mekanisme ini adalah Polisi Militer, yang memiliki kewenangan khusus dalam mengusut pelanggaran hukum yang dilakukan oleh personel TNI.<sup>8</sup> Polisi Militer merupakan aparat penegak hukum internal TNI yang bertugas menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan, penahanan, pengawasan tahanan militer, hingga pelimpahan berkas perkara ke Oditur Militer. Tugas ini bersifat strategis karena berkaitan langsung dengan penegakan hukum serta disiplin prajurit. Dalam perkara pembunuhan, Polisi Militer harus bertindak profesional dalam mengamankan tersangka, melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), memeriksa saksi-saksi, serta mengumpulkan barang bukti untuk memperkuat proses penyidikan.

Salah satu kendala serta tantangan utama yang dihadapi Polisi Militer adalah menjaga keseimbangan antara loyalitas institusional dan keadilan hukum. Ketika tersangka merupakan anggota aktif TNI, terdapat tekanan moral dan struktural yang tidak bisa diabaikan. Namun, profesionalisme dalam melaksanakan prosedur hukum menjadi keharusan.<sup>9</sup> Penanganan kasus pembunuhan oleh anggota TNI tidak boleh terkesan ditutupi atau diredam demi menjaga nama baik institusi. Sebaliknya, keterbukaan dalam proses hukum yang dijalankan secara internal akan mencerminkan komitmen militer terhadap prinsip keadilan dan supremasi hukum. Polisi Militer juga tidak boleh terpengaruh oleh pangkat, jabatan, atau kedekatan personal dengan tersangka. Integritas penegak hukum harus dijunjung tinggi agar proses hukum tetap berjalan sesuai asas-asas yang berlaku. Proses penyidikan harus menjunjung asas praduga tak bersalah, di mana tersangka tetap dianggap tidak bersalah sampai ada keputusan hukum yang berkekuatan tetap.

---

<sup>8</sup> Yudi Krismen. (2014). Dilema Penegakan Hukum Pidana terhadap Prajurit TNI. *Jurnal Selat*, 2(1), 146-155.

<sup>9</sup> Niken, S. U. B. S. (2014). Yurisdiksi Peradilan Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia Sebagai Pelaku Tindak Pidana. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(2), 100-105.

Tugas Polisi Militer tidak berhenti pada tahap penangkapan. Mereka harus memastikan bahwa seluruh proses hukum berjalan berdasarkan prosedur peradilan militer yang sah. Hal ini mencakup penyusunan berita acara pemeriksaan, dokumentasi bukti, serta pelaporan kronologi kejadian kepada atasan dan instansi terkait. Semua proses ini harus dilaksanakan secara teliti, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.<sup>10</sup> Dalam pelaksanaan tugasnya, Polisi Militer bekerja sama dengan Oditur Militer sebagai jaksa militer yang akan menangani perkara hingga ke tahap persidangan. Kolaborasi antara kedua lembaga ini menjadi penting untuk memastikan adanya kesinambungan dalam penegakan hukum. Penyidikan yang tidak komprehensif dari Polisi Militer akan menyulitkan Oditur dalam menyusun dakwaan dan argumen hukum saat proses pengadilan berlangsung. Dalam hal ini, peran Polisi Militer menjadi sangat penting dalam membentuk persepsi publik mengenai integritas penegakan hukum di lingkungan TNI. Meskipun perkara berada di ranah peradilan militer, standar hukum yang digunakan tetap merujuk pada norma-norma hukum pidana umum.<sup>11</sup> Artinya, pasal-pasal KUHP yang mengatur mengenai pembunuhan tetap digunakan sebagai dasar hukum. Polisi Militer wajib memahami dan menerapkan ketentuan ini secara tepat agar proses hukum tidak mengalami kekeliruan dan tetap mengedepankan kepentingan keadilan.

Pelatihan dan pendidikan profesional bagi personel Polisi Militer menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas tugas mereka. Tanpa pemahaman yang memadai tentang hukum acara, teknik investigasi forensik, serta etika penegakan hukum, dikhawatirkan proses penyidikan akan mengalami banyak kelemahan. Hal ini bisa berdampak pada tidak terpenuhinya rasa keadilan, baik bagi korban maupun tersangka. Sikap netral dan objektif sangat diperlukan dalam menangani kasus-kasus berat seperti pembunuhan.<sup>12</sup> Masyarakat sipil pun menaruh harapan besar agar TNI mampu membuktikan bahwa semua anggotanya tunduk pada hukum tanpa pandang bulu. Penanganan perkara pidana oleh Polisi Militer juga merupakan bagian dari upaya pembinaan personel TNI. Ketika sebuah tindakan kriminal ditindak secara tegas dan adil, hal ini memberikan pesan yang jelas kepada prajurit lainnya mengenai konsekuensi dari setiap pelanggaran. Disiplin dan ketaatan terhadap hukum akan terbangun jika penegakan hukum dilakukan secara konsisten dan tidak diskriminatif. Pembunuhan sebagai tindak pidana yang merampas nyawa manusia tidak boleh dianggap sebagai pelanggaran biasa.<sup>13</sup> Di lingkungan militer, tindakan ini juga merupakan pelanggaran terhadap sumpah prajurit dan nilai-nilai dasar TNI. Polisi Militer sebagai garda depan penegakan hukum di lingkungan militer memiliki tanggung jawab ganda, yakni menegakkan keadilan dan menjaga kehormatan institusi.

Dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pembunuhan yang melibatkan anggota TNI, setelah Polisi Militer menyelesaikan penyelidikan, penyidikan, penahanan, pengawasan tahanan militer, hingga pelimpahan berkas perkara ke Oditur Militer. Polisi Militer juga harus membuat masyarakat tetap percaya bahwa penyelesaian kasus tersebut akan berjalan sesuai dengan prosedur. Masyarakat umum sering kali memiliki persepsi negatif terhadap proses hukum militer, yang dianggap tertutup dan tidak transparan. Untuk mengatasi hal ini, langkah-langkah akuntabel dari Polisi Militer sangat diperlukan. Publikasi hasil penyidikan, konferensi pers, dan pelibatan media dalam batas wajar bisa menjadi strategi untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi militer.<sup>14</sup> Kerja sama antara Polisi Militer dan instansi hukum sipil

<sup>10</sup> Putra, I., & Lubis, A. F. (2020). Pembaharuan Hukum : Reformasi Sistem Peradilan Militer di Indonesia Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM-PTHM , Indonesia. *Public Service And Governance Journal*, 1(2), 158-184.

<sup>11</sup> Parningotan, J. (2021). Peradilan Pidana Militer Dikaitkan dengan Asas Equality Before The Law. *Panji Keadilan Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*, 4(2), 246.

<sup>12</sup> Yudi Krismen. (2014). Dilema Penegakan Hukum Pidana terhadap Prajurit TNI. *Jurnal Selat*, 2(1), 146-155. <http://law.umrah.ac.id/wp-content/uploads/2015/01/JURNAL-SELAT-3-yudi-krismen.pdf>

<sup>13</sup> Widodo, A., Setiyono, S., Suratman, T., & Sabrina, N. (2023). Analisis Yuridis tentang Pembunuhan yang dilakukan oleh Anggota TNI Angkatan Darat terhadap Warga Sipil. *Bhirawa Law Journal*, 4(1), 69-77.

<sup>14</sup> Nauli, D., Simanjuntak, R., Kadafi, A., Siahaan, B. J., Kaban, H. E., Aryaputra, F., Sukma, N. F., & Galuh, P. (2024). Kontribusi Dan Peran Polisi Militer Dalam Menegakkan Hukum Dan Keadilan Dalam Lingkungan Tentara Nasional Indonesia. *Jurnal*

juga adalah yang penting, terutama jika korban atau dampak dari tindakan pembunuhan melibatkan masyarakat sipil. Dalam kondisi semacam ini, dibutuhkan koordinasi hukum agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan hukum. Kejelasan yurisdiksi dan komunikasi antarlembaga dapat mencegah potensi konflik antara hukum militer dan hukum sipil. Dalam kasus tertentu, tindakan pembunuhan yang dilakukan prajurit TNI mungkin terjadi di luar dinas atau di luar area tugas. Hal ini tidak mengurangi tanggung jawab hukum yang melekat. Status militer tetap menjadi dasar penentuan yurisdiksi perkara, dan Polisi Militer harus tetap menjalankan tugas penyidikan hingga proses pelimpahan ke pengadilan militer.<sup>15</sup>

Evaluasi berkala terhadap sistem dan prosedur penegakan hukum internal TNI sangat dibutuhkan. Dari kasus-kasus yang pernah ditangani, dapat ditarik pelajaran mengenai kelemahan, kekuatan, serta potensi perbaikan yang dapat dilakukan ke depan. Polisi Militer dapat menjadi agen perubahan dalam reformasi peradilan militer jika didukung oleh sistem yang transparan dan berbasis profesionalisme.<sup>16</sup> Tindak pidana pembunuhan bukan hanya menjadi masalah hukum, melainkan juga menyentuh aspek psikologis dan sosial dalam kehidupan militer. Polisi Militer, selain sebagai penyidik, juga dapat memberikan masukan kepada pimpinan terkait aspek pembinaan mental prajurit. Upaya preventif seperti konseling, pelatihan pengendalian emosi, dan pembinaan karakter dapat dimaksimalkan untuk menghindari pelanggaran serupa di masa mendatang. Perlu dipahami bahwa peran Polisi Militer bukan semata-mata sebagai alat represif, tetapi juga sebagai penjaga moral prajurit. Ketika hukum ditegakkan dengan adil dan tegas, maka moralitas dan disiplin prajurit juga akan meningkat. Hal ini akan menciptakan suasana kerja yang lebih sehat dan harmonis di lingkungan TNI.<sup>17</sup>

Kesadaran hukum di kalangan prajurit TNI juga harus terus ditingkatkan. Sosialisasi tentang tindak pidana dan sanksi hukumnya perlu dilakukan secara rutin, agar anggota TNI memahami bahwa tidak ada kekebalan hukum bagi siapa pun. Polisi Militer memiliki peran dalam menyampaikan pesan ini melalui kegiatan preventif seperti penyuluhan hukum dan patroli disiplin. Konsistensi dalam penegakan hukum menjadi kunci untuk menciptakan budaya militer yang taat pada aturan.<sup>18</sup> Tidak cukup hanya menindak pelanggaran ketika sudah terjadi, tetapi perlu juga membangun sistem pengawasan dan pelaporan yang efektif. Polisi Militer dapat berperan aktif dalam sistem ini dengan melakukan pengawasan intensif terhadap perilaku prajurit di satuan-satuan tugas. Polisi Militer yang profesional dan berintegritas akan menjadi pilar penting dalam menciptakan TNI yang bersih, disiplin, dan taat hukum. Ketika peran ini dijalankan secara optimal, kepercayaan publik terhadap institusi militer akan semakin menguat. Penegakan hukum terhadap pelanggaran berat seperti pembunuhan menjadi ujian nyata atas komitmen TNI untuk menjadi institusi yang menjunjung tinggi nilai-nilai hukum dan keadilan.<sup>19</sup>

## KESIMPULAN

Polisi Militer memegang peranan yang sangat penting dalam sistem hukum militer, terutama ketika menghadapi kasus-kasus berat seperti tindak pidana pembunuhan yang

---

*Relasi Publik*, 2(3), 304-309.

<sup>15</sup> Parningotan, J. (2021). Peradilan Pidana Militer Dikaitkan dengan Asas Equality Before The Law. *Panji Keadilan Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*, 4(2), 246.

<sup>16</sup> Fitriana, M. K. (2014). Yurisdiksi Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Umum Yang Melibatkan Militer dan Sipil. *Arena Hukum*, Vol.7(80), 270-286.

<sup>17</sup> Nauli, D., Simanjuntak, R., Kadafi, A., Siahaan, B. J., Kaban, H. E., Aryaputra, F., Sukma, N. F., & Galuh, P. (2024). Kontribusi Dan Peran Polisi Militer Dalam Menegakkan Hukum Dan Keadilan Dalam Lingkungan Tentara Nasional Indonesia. *Jurnal Relasi Publik*, 2(3), 304-309.

<sup>18</sup> Yudi Krismen. (2014). Dilema Penegakan Hukum Pidana terhadap Prajurit TNI. *Jurnal Selat*, 2(1), 146-155.

<sup>19</sup> Br.Purba, P. J., Haeranah, & Adhyanti, H. (2023). Penegakan Hukum Bagi Anggota Militer Angkatan Darat Yang Terlibat Tindak Pidana Narkotika (Studi di POMDAM XIV/Hasanuddin). *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(2), 208-217.

dilakukan oleh anggota TNI. Tugas dan tanggung jawab mereka mencakup serangkaian proses hukum, mulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, pengumpulan bukti, hingga pelimpahan berkas ke Oditur Militer. Setiap tahapan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga sangat menentukan citra dan kredibilitas institusi TNI di mata masyarakat. Penanganan tindak pidana pembunuhan oleh aparat TNI menuntut Polisi Militer untuk bekerja secara profesional, netral, dan transparan. Dalam proses ini, mereka harus menyeimbangkan antara kepentingan hukum dan stabilitas institusional, tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap pelaku hanya karena berstatus sebagai prajurit aktif. Penyidikan yang dilakukan harus didasarkan pada fakta, bukti yang sah, dan prinsip-prinsip hukum acara yang berlaku. Asas praduga tak bersalah tetap dijunjung tinggi, namun bukan berarti mengurangi ketegasan dalam menindak.

Penegakan hukum yang tegas dan objektif terhadap anggota TNI yang melakukan pembunuhan merupakan refleksi nyata dari komitmen TNI terhadap nilai-nilai keadilan dan supremasi hukum. Masyarakat menaruh harapan besar pada proses hukum yang berjalan terbuka dan tidak menutupi pelanggaran internal. Ketika Polisi Militer mampu membuktikan bahwa lembaga militer tidak mentoleransi pelanggaran hukum, kepercayaan publik akan meningkat secara signifikan. Tugas Polisi Militer tidak hanya berfokus pada aspek represif, tetapi juga mencakup upaya preventif dan kuratif. Mereka dapat berperan aktif dalam memberikan edukasi hukum, menyosialisasikan konsekuensi dari tindak pidana berat, serta membina kesadaran disiplin melalui penyuluhan dan patroli rutin. Di sisi lain, ketika suatu kasus terjadi, evaluasi terhadap sistem pembinaan prajurit, beban psikologis, dan kondisi lingkungan kerja juga perlu diperhatikan sebagai bagian dari pencegahan berulangnya tindak pidana serupa. Polisi Militer juga perlu melakukan koordinasi yang baik dengan Oditur Militer, perwira penegak hukum, dan lembaga pendukung lainnya agar proses hukum berjalan secara sistematis dan terarah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Br.Purba, P. J., Haeranah, & Adhyanti, H. (2023). Penegakan Hukum Bagi Anggota Militer Angkatan Darat Yang Terlibat Tindak Pidana Narkotika (Studi di POMDAM XIV/Hasanuddin). *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(2), 208-217.
- Fitriana, M. K. (2014). Yurisdiksi Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Umum Yang Melibatkan Militer dan Sipil. *Arena Hukum*, Vol.7(80), 270-286.
- Nauli, D., Simanjuntak, R., Kadafi, A., Siahaan, B. J., Kaban, H. E., Aryaputra, F., Sukma, N. F., & Galuh, P. (2024). Kontribusi Dan Peran Polisi Militer Dalam Menegakkan Hukum Dan Keadilan Dalam Lingkungan Tentara Nasional Indonesia. *Jurnal Relasi Publik*, 2(3), 304-309.
- Parningotan, J. (2021). Peradilan Pidana Militer Dikaitkan dengan Asas Equality Before The Law. *Panji Keadilan Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*, 4(2), 246.
- Putra, I., & Lubis, A. F. (2020). Pembaharuan Hukum : Reformasi Sistem Peradilan Militer di Indonesia Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM-PTHM , Indonesia. *Public Service And Governance Journal*, 1(2), 158-184.
- Soekanto, S. (1977). Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 7(6), 462-468. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol7.no6.742>
- Widodo, A., Setiyono, S., Suratman, T., & Sabrina, N. (2023). Analisis Yuridis tentang Pembunuhan yang dilakukan oleh Anggota TNI Angkatan Darat terhadap Warga Sipil. *Bhirawa Law Journal*, 4(1), 69-77. <https://doi.org/10.26905/blj.v4i1.10322>
- Yudi Krismen. (2014). Dilema Penegakan Hukum Pidana terhadap Prajurit TNI. *Jurnal Selat*, 2(1), 146-155. <http://law.umrah.ac.id/wp-content/uploads/2015/01/JURNAL-SELAT-3-yudi-krismen.pdf>